



Sense Of Place dan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Wisata Pantai Ujong Batee Kabupaten Aceh Besar

Faradilla Fadlia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Cut Maya Aprita Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Abstrak : *Pantai Ujong Batee sebagai lokasi wisata menawarkan keindahan alam di pesisir pantai. Aset tersebut menjadi nilai jual yang ditawarkan oleh para pengelola usaha. Akan tetapi, tata kelola lokasi wisata yang buruk dan kerusakan pantai malah terjadi akibat pembuangan sampah berupa sampah plastik dan organik (kulit kelapa muda) yang dilakukan oleh pengelola tempat usaha maupun pengunjung. Mereka membuang sampah di pesisir pantai sehingga merusak pemandangan dan keindahan pantai. Hasil interveiw awal dengan para pengelola usaha menemukan bahwa kebanyakan dari pengelola usaha bukan pemilik utama. Mereka hanya menggunakan lahan tanpa membayar sewa dan apabila pemilik lahan secara tiba-tiba ingin menggunakan lahan maka penjual harus mengembalikan lahan usaha tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan tata kelola lokasi wisata yang buruk di kawasan pantai Ujong Batee dengan menggunakan konsep sense of place dan teori green politics sebagai alat analisis. Penelitian ini adalah penelitian survai yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan 30 orang responden yang merupakan pemilik café di kawasan wisata. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kerusakan lingkungan disebabkan karena tidak adanya sense of place dari pemilik café terhadap lokasi tempat mereka berjualan. Hal ini terjadi karena lahan kawasan wisata bukanlah milik pribadi pemilik café. Sense of place yang rendah menyebabkan tidak adanya komitmen dari para pemilik café untuk menjaga kebersihan dan keindahan lokasi wisata dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.*

Kata Kunci: *Kerusakan Lingkungan, Lokasi Wisata, Sense of Place*

¹ Korespondensi Penulis: Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala. Email: cutmayaapritasari@unsyiah.ac.id



A. Pendahuluan

Lingkungan merupakan isu krusial yang berkembang dewasa ini. Pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam menjadi dampak dari kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang masih menjadi isu penting di Indonesia adalah kerusakan lingkungan di wilayah pantai. Penyebab kerusakan tersebut didominasi oleh sampah. Membuang sampah ke wilayah pantai merupakan kebiasaan masyarakat yang mencemari lingkungan termasuk ekosistem pantai. Permasalahannya adalah, air laut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Air laut membutuhkan waktu 450 tahun untuk menguraikan sampah botol plastik. Sedangkan kertas bekas karcis membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu untuk diuraikan (Vatria, 2010).

Pantai merupakan salah satu potensi wisata yang mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomis tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi daerah dan Negara. Sayangnya, masih banyak pantai di Indonesia yang tidak dijaga kebersihannya sehingga menurunkan nilai jualnya sebagai tempat wisata. Akibat dari kegiatan membuang sampah sembarangan, pantai di Indonesia mengalami dampak seperti pencemaran pantai, kerusakan ekosistem, kematian sumber daya hayati dan sebagainya. Vatria (2010) menyatakan bahwa di sepanjang tahun 2008 sedikitnya terdapat 8 kasus pencemaran pantai yang sangat memprihatinkan yaitu: (1) Kampung Nelayan Dapur 12, Kota Batam, (2) Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, (3) Perairan Laut Jawa wilayah Kab. Cirebon, (4) Kampung Nongsa, Kota Batam, (5) Begawan Solo, (6) pesisir Indramayu seperti Eretan, Cantigi, Balongan, dan Karangsong, (7) Cilacap dan (8) Teluk Ambon, Maluku.

Hal serupa juga terjadi pada pantai-pantai lokasi wisata di Provinsi Aceh, salah satunya adalah di kawasan wisata pantai Ujong Batee di Kabupaten Aceh Besar. Lokasi wisata Ujong Batee menawarkan keindahan pantai dan alam yang menjadi asset besar bagi masyarakat dan daerah. Apabila dikelola dengan baik, seharusnya kawasan wisata ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Dibandingkan dengan beberapa pantai lain yang cukup terkenal sebagai pusat rekreasi seperti pantai Lampu'uk dan Pantai Lhok Nga, Pantai Ujong Batee justru termasuk pantai yang sepi pengunjung.

Dari hasil observasi awal ke lokasi wisata, pemilik café disepanjang ujung batee membuang sampah batok kelapa, sedotan dan tisu langsung ke pantai yang merusak keindahan pantai dan dari survey awal ditemukan bahwa permasalahan sampah menjadi masalah utama bagi para pemilik usaha. Adi seorang pemilik café yang juga menjabat sebagai wakil ketua pengelola kawasan wisata Ujong Batee mengatakan bahwa dia setiap harinya membersihkan lokasi

usahanya tetapi karena penjual sekitarnya tidak melakukan hal yang sama maka angin akhirnya menyapu sampah dari lokasi seberang menuju ke lokasinya.

Peneliti bertanya mengapa sesama penjual tidak mencari solusi untuk masalah yang sama yaitu seperti membentuk organisasi yang menaungi kepentingan para penjual dilokasi tersebut. Jawaban dari para penjual bahwa mereka pernah membuat organisasi tetapi tidak berlanjut dikarenakan komitmen yang rendah dari para penjual. Peneliti juga bertanya masalah kepemilikan lahan rata-rata para penjual mengatakan bahwa mereka bukan pemilik lahan atau menyewa lahan dari pemiliknya. Mereka hanya menggunakan lahan tanpa membayar sewa atau bagi hasil tetapi apabila pemilik lahan secara tiba-tiba ingin menggunakan lahan maka penjual harus mengembalikan lahan usaha tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, Peneliti menarik kesimpulan sementara bahwa karena lahan tersebut bukan kepemilikan pengusaha tetapi digunakan secara cuma-cuma oleh pemilik café yang mengakibatkan tidak adanya rasa akan kepemilikan terhadap lokasi yang menyebabkan rendahnya keinginan dan komitmen untuk memajukan lokasi wisata tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Mix Method). Lokasi penelitian ini adalah di kawasan wisata Pantai Ujong Batee, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Pengambilan sampel dilakukan mengikut non probability sampling secara purposive yaitu melibatkan sebanyak 30 orang pemilik café yang berjualan disepanjang pantai Ujong Batee sebagai responden. Dalam penelitian survai, unit analisa yang digunakan adalah individu. Tujuannya adalah untuk menemukan umpan balik dari pemilik café melalui hasil survai yang dilaksanakan (Babbie, 2001: 268–270). Tata cara pelaksanaan penelitian dapat dirincikan pada poin-poin dibawah ini:

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui survei dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui pengisian kuisisioner oleh responden. Sedangkan data kualitatif dalam metode survai disebut dengan Interview Surveys yang didapatkan melalui slip yaitu sepotong kertas yang disediakan untuk mengisi informasi tambahan disamping penggunaan kuisisioner. Setiap slip akan diberikan identifikasi seperti nomor maupun nama responden. Slip kemudian disusun sistematis untuk memudahkan analisis data. Untuk melengkapi data kualitatif, penelitian ini juga turut menggali informasi melalui beberapa key Informan yang dipilih secara purposif guna

memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian (Singarimbun, 2008: 1–10).

b. Teknik *Pengolahan dan Analisis Data*

Data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan selanjutnya akan melalui proses pengelolaan data. Untuk data kuantitatif, setiap jawaban responden akan diorganisasikan dan diterjemahkan dalam bentuk tabel. Sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara baik yang tertulis dalam Slip maupun dalam bentuk rekaman, akan di deskripsikan melalui transkripsi. Data kualitatif ini akan ditulis kembali dalam bentuk yang beraturan kemudian dikelompokkan menurut sub tema tertentu disesuaikan dengan keperluan data merujuk kepada objektif kajian. Analisa selanjutnya dilakukan dengan mengkombinasikan antara hasil penelitian dalam bentuk data kuantitatif dengan hasil wawancara yang telah dilakukan selama masa penyebaran kuisioner.

Penelitian survai yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Mix Method) ini dirasakan cocok untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Kelebihan dari metode ini adalah mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena sosial baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk deskripsi (Singarimbun, 2008: 1–10).

c. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari proses survai melalui pengisian kuisioner oleh responden dan hasil wawancara yang dilakukan selama proses penyebaran kuisioner. Sedangkan data skunder diperoleh dari sumber-sumber bacaan terkait berupa buku-buku, majalah, jurnal, maupun koran yang memuat informasi berkenaan dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Menurunnya Jumlah Wisatawan Di Kawasan Wisata Pantai Ujong Batee

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari proses survai melalui pengisian kuisioner oleh responden dan hasil wawancara yang dilakukan selama proses penyebaran kuisioner. Sedangkan data skunder diperoleh dari sumber-sumber bacaan terkait berupa buku-buku, majalah, jurnal, maupun koran yang memuat informasi berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Menurunnya jumlah wisatawan lokal merupakan masalah yang krusial yang dihadapi oleh para pengusaha. Ibu Erawaty mengatakan bahwa dulu sebelum tsunami wilayah wisata ujung batee banyak mendapatkan kunjungan wisatawan lokal bahkan menjadi pusat wisata pantai bagi masyarakat dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Tetapi setelah tsunami hal tersebut berubah, Pantai Lampuuk dan Pantai Lhok Nga menjadi pusat wisata pantai bagi masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ibu Erawaty sendiri tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke pantai Ujong Batee.

Pengakuan yang sama pula diungkapkan oleh Nurbayani. Ia mengeluhkan jumlah wisatawan yang berkurang. Hal ini berimplikasi kepada omset penjualan yang terus menurun. Bahkan di hari biasa, ia dan pemilik café lainnya jarang membuka tempat usaha mereka karena sangat sepi pengunjung. Sehingga mereka hanya berjualan pada hari libur seperti sabtu dan minggu. Jumlah pengunjung juga bervariasi, namun biasanya mereka hanya mendapat keuntungan sekitar dua ratus ribu rupiah dalam satu hari.

b. Lokasi Wisata yang Tidak Memiliki Standar Kelayakan Tempat Usaha

Selain permasalahan menurunnya jumlah wisatawan yang berdampak kepada menurunnya pula omset penjualan, Para pemilik café di kawasan wisata pantai Ujong Batee juga menghadapi permasalahan lain yaitu tidak adanya standar kelayakan tempat usaha yang seharusnya dimiliki. Dari hasil survey yang telah dilakukan, kawasan wisata pantai Ujong Batee telah memiliki organisasi/ perkumpulan pemilik café yang diketuai oleh Azhar sebagai pengelola dan Adi sebagai wakil pengelola. Namun demikian, organisasi ini tidak berfungsi secara maksimal dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemilik café.

Organisasi yang terbentuk selama ini terkesan hanya sebagai formalitas dan tidak memiliki Standar Operation Procedure (SOP) formal seperti organisasi pada umumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kawasan wisata pantai Ujong Batee tidak memiliki standard kelayakan tempat usaha yang meliputi kriteria umum seperti aspek kebersihan, sarana pariwisata, objek wisata yang dikemas menarik, pelayanan yang baik, serta akses yang mudah.

Sebagai contoh, setiap café tidak memiliki daftar menu dan harga yang jelas. Sehingga pengunjung tidak mendapatkan standard harga yang sama dan sering mempertanyakan soal perbedaan harga ini. Adi menjelaskan bahwa wisatawan yang berkunjung biasanya adalah muda mudi atau keluarga. Jika pasangan muda mudi yang datang biasanya mereka



menghabiskan waktu yang sangat lama duduk dan hanya memesan satu jenis minuman. Dan jika keluarga yang datang biasanya mereka membawa makanan dari rumah dan juga hanya memesan satu minuman.

Lebih lanjut, Adi mengatakan bahwa dia sebagai pengusaha kebingungan. Salah satu solusi yang ia lakukan yaitu menambahkan biaya sewa tempat bagi pengunjung yang duduk lama dan hanya memesan satu minuman. Bahkan dalam kasus seperti ini, Adi akan menaikkan harga minuman yang dipesan. Perlakuan ini akan berbeda dengan pengunjung lain yang tidak membawa makanan dari rumah dan memesan makanan serta minuman ditempatnya. Maka Pemungutan sewa tempat tidak dilakukan oleh Adi. Hal ini terkadang menuai protes dari pengunjung yang merasa tidak ada kejelasan soal harga.

Berkaitan dengan harga pula, Asmah seorang pemilik café lainnya menuturkan bahwa saat pengunjung datang, mereka akan bertanya berapa harga salah satu minuman dan pengunjung membandingkan dengan harga di café sebelahnya. Akhirnya pengunjung memutuskan untuk pergi ke café yang lebih murah tersebut. Ini menjadi permasalahan karena baik si pemilik usaha dan pengunjung merasa dirugikan akibat tidak adanya standar harga tersebut. Pemilik usaha merasa di curangi oleh saingannya dan pengunjung merasa tidak mendapatkan harga yang sesuai.

c. Permasalahan Sampah di Lokasi Wisata

Permasalahan lainnya adalah masalah sampah menjadi persolan yang utama, banyaknya sampah di lokasi tersebut di sebabkan oleh pemilik café dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat 26 pemilik café yang mengakui bahwa mereka membuang sampah sembarangan dan hanya 4 orang pemilik café yang membuang sampah di tempat sampah. Mereka menyatakan bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan. Sampah biasanya dibuang di belakang café dan hanya dibersihkan saat mereka sempat atau saat pengelola tempat wisata mengadakan gotongroyong bersama. Namun gotong royong tersebut juga tidak terjadwal sehingga tidak ada waktu pasti kapan pemilik café akan amembersihkan tempat usaha mereka.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa 7 orang dari 26 orang pemilik café yang mengaku membuang sampah sembarangan ternyata membuang sampah batok kelapa muda langsung ke laut dan berasumsi bahwa sampah tersebut akan terbawa arus dan hilang dengan sendirinya. Musliadi, salah satu pemilik café menyatakan bahwa ia sudah berusaha membersihkan sampah di lokasi berjualan tetapi angin sering kali menerbangkan sampah



dari cafe sebelah ke café milik Musliadi. Hal ini menyebabkan pemilik café seperti Musliadi enggan membersihkan café nya karena menganggap sampah dari café sebelah juga nantinya akan mengotori tempat usahanya.

Sampai sejauh ini, Azhar pengelola kawasan wisata Ujong Batee menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah bekerjasama dengan dinas kebersihan setempat. Sehingga mereka merasa kebingungan mau membuang sampah kemana dan siapa yang akan membawa sampah tersebut nantinya. Oleh karena itu pilihan jatuh kepada menumpuk sampah sembarangan ataupun membakar sampah tersebut atas inisiatif pribadi.

d. Sense of Place dan Pengelolaan Wisata yang Ramah Lingkungan

Sense of Place adalah konsep turunan dari Geography and Place yang merupakan hasil pemikiran dari John Agnew (1987). Dalam studi ilmu politik, geography and place berusaha menjelaskan secara sistematis tentang mengapa suatu tempat dinilai unik dan memiliki karakter tersendiri sehingga misalnya mampu menarik investor, ataupun menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari tempat lainnya.

Agnew (1987) menjelaskan bahwa Place (tempat) menyediakan pengaturan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Dalam hal ini, place merupakan kombinasi dari tiga aspek yaitu place sebagai “location” dimana place dilihat dari aspek peran atau fungsi tempat tersebut sebagai contoh: lokasi sebagai tempat pariwisata, sebagai tempat pertambangan. Kedua, place sebagai “Locale” atau merujuk kepada institusi yang mengorganisir aktivitas masyarakatnya disuatu tempat. Contohnya adalah institusi seperti sekolah, tempat kerja, komunitas, maupun partai politik. Kombinasi dari institusi tersebut membentuk kehidupan sosial masyarakat di tempat tertentu (Flint 2006: 5).

Ketiga sense of place, yaitu identitas personal yang berfungsi sebagai keanggotaan dalam identitas kolektif seperti gender, kelas sosial, nationality and place. Sense of place adalah identitas sosial yang terikat dengan tempat tertentu. Suatu karakter unik tentang suatu tempat, dan tindakan yang yang digerakkan oleh identitas tertentu yang menyatakan siapa mereka, apa yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa lakukan dalam tempat tersebut (Flint 2006: 6).

Sense of place juga diartikan sebagai bagian dari rasa akan kepemilikan terhadap tempat tertentu dan dapat di terjemahkan kedalam impian mengenai bagaimana suatu tempat seharusnya terlihat terutama who belongs and who doesn't. Awalnya, konsep sense of place digunakan untuk mengkonstruksi sebuah identitas politik terhadap penduduk asli dan

pendatang. Bagian dari rasa akan kepemilikan adalah melekatnya seseorang kepada suatu tempat sehingga mereka merasa memiliki kedekatan emosional dan merasa dirinya adalah bagian dari tempat tersebut. Namun demikian, sifatnya yang multi dimensional membuat konsep ini mampu menjelaskan tidak hanya tentang identitas politik semata melainkan mampu menjelaskan permasalahan lain yang berkaitan dengan rasa kepemilikan akan suatu tempat.

Konsep sense of place dapat menjawab permasalahan sampah di kawasan wisata pantai Ujong Batee. Melalui tulisan ini, dapat dilihat bahwa ternyata permasalahan sampah yang terjadi di kawasan wisata bukan hanya terjadi karena faktor kebiasaan. Tetapi ada faktor lain yang dominan yaitu tidak terciptanya kombinasi positif dari location, locale, dan sense of place baik dari pemilik café disepanjang pantai, maupun dari pengunjung yang datang (Flint 2006: 6-7).

Berdasarkan konsep diatas, dapat dilihat bahwa apabila terdapat koordinasi efektif antara ketiganya maka dapat menyelesaikan permasalahan wisata yang ada di pantai Ujong Batee. Place sebagai location seharusnya menunjukkan peran dan fungsi dari tempat tersebut. Pantai Ujong batee memiliki fungsi sebagai tempat wisata dan tempat berjualan bagi pemilik café. Atas dasar ini, seharusnya terbangun pemahaman bahwa Ujong Batee sebagai location harus difungsikan dengan baik dan dijaga keberadaannya agar memberikan manfaat secara ekonomis dan sosial kepada pemilik café maupun masyarakat. Berdasarkan konsep Geography and Place, keberadaan location ini harus dipahami dengan baik sebelum mengkonstruksi sense of place.

Selanjutnya, place sebagai locale yaitu merujuk kepada organisasi yang mengorganisir location. Dalam hal ini, kawasan wisata pantai Ujong Batee telah memiliki organisasi yang menaungi para pemilik café. Namun organisasi ini tidak bekerja secara optimal dan tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha cukup rumit apabila harus diselesaikan sendiri karena kebanyakan dari permasalahan tersebut melibatkan komitmen dari seluruh pengusahaan di kawasan lokasi. Permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan apabila ada konsensus bersama antara pemilik pemilik café. Hal tersebut menjadi sulit karena keberadaan organisasi yang menaungi para pemilik café hanya sebatas formalitas. Ini berimplikasi kepada tidak mampunya tidak mampunya Locale untuk menjawab permasalahan yang ada.

Azhar selaku ketua pengelola kawasan wisata ujong bate menyatakan bahwa dirinya hanya mengorganisir para pemilik café untuk membersihkan

lokasi berjualan di hari jumat. Hal itu juga tidak pasti dilakukan setiap minggu. Sedangkan Adi sebagai wakil pengelola mengakui bahwa organisasi yang menaungi para pemilik café ini tidak banyak berkontribusi bagi para pemilik café. Dari pernyataan tersebut maka dapat dianalisa bahwa Locale yang merujuk kepada organisasi yang menaungi para pemilik café tidak berfungsi dengan baik.

Ketiga, adalah sense of place, yaitu identitas sosial yang terkait dengan rasa kepemilikan terhadap suatu tempat. Hasil wawancara dengan para pemilik café menjelaskan bahwa ternyata seluruh tempat yang mereka gunakan untuk berjualan bukanlah milik pribadi, melainkan menyewa dari pihak lain. Pemilik café menggunakan tempat tanpa membayar sewa atau menggunakan sistem bagi hasil dengan konsekuensinya, pemilik tempat dapat sewaktu-waktu menarik kembali tempat tersebut.

Terdapat kejanggalan disini, dimana apabila dilihat dari segi ekonomi politik, pantai merupakan public good yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dan tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Keadaan ini mengakibatkan para pemilik café tidak memiliki komitmen atas tempat yang mereka gunakan.

Melalui sudut pandang sense of place dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki rasa kepemilikan atas tempat karena merasa bahawa tempat tersebut bukan punya mereka. Ini berimplikasi kepada rendahnya tanggungjawab para pemilik café dalam menjaga kebersihan dan cenderung membuang sampah sembarangan. Mereka hanya berjualan seadanya tanpa melihat peluang, berusaha meningkatkan pendapatan, berinovasi dengan produk dan memperbaiki lokasi wilayah berjualan. Yang pada akhirnya memperburuk keadaan di lokasi wisata seperti sampah yang menumpuk, banyaknya café yang tidak layak guna dan tidak direnovasi, serta membiarkan kawasan wisata dalam kondisi yang tidak tertata rapi. Dari ketiga aspek geography and place yang dijelaskan oleh Agnew (1987) maka dapat dianalisis bahwa ketiganya tidak bersinergi dengan baik sehingga permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan.

e. Mensinergikan Location, Locale, Sense of Place dan Pemerintah

Sinergisitas antara Location, Locale, Sense Of Place, dan pemerintah dapat dilakukan dengan menerapkan teori green politics yang merupakan golongan teori baru yang muncul dalam kajian pemikiran politik. Teori ini berfokus pada hal-hal filosofis seperti hubungan antara manusia dan lingkungan. Hubungan ini menghendaki adanya pengaturan kehidupan yang lebih baik dan keteraturan sosial secara polititis maupun inovasi teknologi.

Green politics berfokus kepada lingkungan termasuk didalamnya tentang isu-isu kompetisi atas sumber daya alam, perubahan iklim, pencemaran dan sebagainya (Barry dan Dobson, 2003).

Berbagai perjanjian internasional yang muncul sebelumnya seperti Stockholm conference tahun 1972, Brundtland Commission Report tahun 1987, Rio Conference pada tahun 1992, maupun Protocol Kyoto 1997 tidak berjalan semestinya karena berbenturan dengan Negara-negara kuat. Protokol Kyoto misalnya mengatur tentang pemanasan global yang mengancam kehidupan dunia. Namun pelaksanaannya tidak efektif melihat Amerika Serikat sebagai penyumbang gas emisi co terbesar di dunia tidak mau meratifikasi protokol Kyoto dengan alasan dapat merusak industri domestiknya. Institusi global telah gagal menghasilkan penyelesaian permasalahan lingkungan sebab ia harus berhadapan dengan permainan power politics dalam sistem antar-negara.

Keadaan ini memunculkan teori green politics sebagai tanggapan atas gagalnya sistem internasional dalam menyelesaikan isu lingkungan global. Concern dari green politics terletak pada isu lingkungan baik skala lokal, nasional, maupun internasional termasuk polusi, kerusakan hutan, pemanasan global, pencemaran, kerusakan ekosistem dan sebagainya. Pada dasarnya keberadaan teori ini berusaha untuk membangun keyakinan, kesadaran dan aksi sosial terhadap permasalahan lingkungan (Meyer, 2006: 773-775).

Green politics memiliki dua konsep utama yaitu (1) Keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) dan (2) Desentralisasi tata kelola lingkungan. Ecological sustainability merujuk kepada kebutuhan manusia yang terus bertambah, sehingga manusia cenderung melakukan serangkaian aktifitas ekonomi yang sering kali berdampak kepada kerusakan lingkungan. Aktifitas ini biasanya lebih mengedepankan asas pencarian untung secara ekonomi dan mengabaikan dampak lingkungan. Hal ini terjadi di kawasan wisata pantai ujung Batee, dimana para pemilik café lebih cenderung mengutamakan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan usaha mereka namun mengabaikan dampak lingkungan.

Untuk itu perlu adanya harmonisasi antara manusia dan lingkungan, dengan membangun paradigma pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Artinya, seperti yang diungkapkan oleh Vogler (2011: 348-360) harus terdapat linearitas antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pertama: Ecological sustainability dapat diwujudkan dengan mengadopsi ide The Triple Bottom Line (3BL). Ide ini lahir sejak tahun 1990-

an dimana sustainability dapat diwujudkan dengan cara memperhatikan tiga dimensi penting yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Keinginan mendirikan suatu bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan haruslah diiringi dengan penerapan ide 3BL dengan memperhatikan ketiga dimensi yang disyaratkan. Maka pemilik café di kawasan wisata pantai Ujong Batee harus menerapkan ketiga aspek ini.

Dimensi sosial menitikberatkan pada kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, amal, kepekaan budaya. Dimensi lingkungan yaitu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan iklim, pemanasan global, udara, tanah dan polusi air (atau pelestarian) dan penipisan lapisan ozon. Sedangkan dimensi ekonomi dari 3BL mengacu pada keuntungan membuat, mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui keberlanjutan (Kaviitha, 2012: 195-197).

Artinya, pemilik café dalam menjalankan aktifitas ekonominya tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sebagai dampak dari aktifitas ekonomi yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika ingin menjalankan usahanya, maka seorang pemilik café harus malakukan kalkulasi apakah bisnis yang dilakukan akan berdampak positif pada kesejahteraan (dimensi sosial) dan juga tidak berdampak negative pada lingkungan (dimensi lingkungan).

Kedua: Desentralisasi tata kelola lingkungan menjelaskan bahwa Rezim internasional lebih efektif apabila diterapkan dalam skala yang lebih kecil yaitu skala komunitas lokal. Sehingga diperlukan suatu organisasi lokal yang dapat memberikan pressure kepada pemerintah setempat maupun masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Desentralisasi dinilai lebih efektif daripada rezim internasional yang dipenuhi dengan permainan power politics. Desentralisasi tata kelola lingkungan menitikberatkan pada dimensi etis dan kearifan lokal bagi penyelesaian masalah lingkungan.

Merujuk kepada desentralisasi tata kelola lingkungan, komunitas lokal dalam skala kecil lebih efektif daripada harus mengandalkan rezim yang lebih besar untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Komunitas lokal ini merujuk kepada organisasi setempat yang seharusnya mampu memberikan pressure kepada pemerintah untuk turut serta mendukung terwujudnya kebersihan lingkungan. Desentralisasi tata kelola lingkungan menitikberatkan pada dimensi etis dan kearifan lokal bagi penyelesaian masalah lingkungan.

Perspektif green politics menjelaskan bahwa idealnya pemerintah memiliki peran besar dalam menyelenggarakan sustainable development.



Namun dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Aceh Besar yang dalam hal ini adalah kewenangan dari dinas kebersihan tidak pernah berkoordinasi dengan para pemilik café untuk ikut mendorong kebersihan tempat wisata. Melihat konsep kedua ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memfungsikan kembali organisasi yang menaungi para pemilik café.

Perlu dipahami bahwa untuk menyelesaikan persoalan sampah di kawasan wisata pantai Ujong Batee, diperlukan langkah strategis berupa dukungan baik dari organisasi, pemilik café, pengunjung, dan pemerintah. Apabila organisasi sebagai “Locale” yang menaungi pemilik café dan tempat wisata telah difungsikan kembali, maka organisasi ini dapat mendorong pemilik café untuk peduli terhadap “Location” dan mendorong pemilik café lainnya untuk menumbuhkan rasa “sense of place” terhadap tempat usaha mereka. Sinergisitas antara tentu saja pada akhirnya akan berimplikasi terhadap terwujudnya lingkungan yang bersih dan peningkatan omset penjualan.

Upaya untuk mencapai sinergisitas ini memang tidaklah mudah. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dari para pemilik café, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk bersama-sama mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih.

D. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menerima kesimpulan sementara yang diajukan yaitu kerusakan lingkungan dan permasalahan sampah terjadi karena lahan yang pemilik café gunakan bukanlah kepemilikan pribadi. Lahan tersebut merupakan milik orang lain yang digunakan secara cuma-cuma. Keadaan ini mengakibatkan tidak adanya rasa akan kepemilikan terhadap lokasi yang menyebabkan rendahnya keinginan dan komitmen untuk memajukan lokasi wisata tersebut.

Namun demikian kepemilikan lahan bukanlah penyebab tunggal dari permasalahan sampah di kawasan wisata Pantai Ujong Batee. Peneliti menemukan penyebab lainnya yaitu tidak terdapatnya koordinasi efektif antara tiga aspek geography and place yaitu Location, Locale, dan Sense Of Place. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa sinergisitas tiga aspek diatas dengan menggunakan perspektif green politics. Dalam hal ini, green politics melingkupi dua konsep utama yaitu (1) Keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) dan (2) Desentralisasi tata kelola lingkungan. Keberlanjutan ekologis dapat dicapai dengan menerapkan ide Tripple bottom Line (3BL) oleh pemilik café. Sedangkan Desentralisasi tatakelola lingkungan dapat dicapai dengan menggunakan komunitas lokal yaitu memfungsikan





kembali organisasi yang menaungi para pemilik café untuk kemudian memberikan tekanan kepada pemerintah dan membangkitkan sense of place bagi para pemilik café lainnya.

Daftar Pustaka

- Barry, J. dan Dobson, A. (2003). *Green Political Theory: A Report* dalam Handbook of Political Theory disunting oleh Kukathas, C.& Gaus, G. London: Sage.
- Belvi Vatria. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian Vol. 9 No. 1 Jan. 2010: 47 – 54.*
- Earl Babbie. (2001). *The Practice of Social research 9th edition.* Wadsworth.
- Flint, Colin. (2006). *Introduction to Geopolitics.* Oxon :Routledge.
- John M. Meyer. (2006). *Political Theory and The Environment* dalam The oxford book of political Theory, disunting oleh John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips. Oxford University Press. 773–775.
- John Vogler. (2011). *Environmental Issues* dalam The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations Fifth Edition, disunting oleh John Baylis, Steve Smith, dan Patricia Owens. United States: Oxford University: 348–360.
- Kaviitha Gopalakhrisnan,dkk. (2012). Sustainable Supply Chain Management: A Case Study Of British Aerospace (BAe) System. *International Journal Of Production Economics.* (140): 193– 203.
- Masri Singarimbun. (2008). *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES

